



Terbaik Kedua dari 375 Kabupaten Serapan APBD Kubu Raya

▶ Anggaran 2021 Terserap 95,79 Persen

Alhamdulillah kegiatan-kegiatan dan kinerjanya sangat baik semuanya. Termasuk dengan strategi 'kepong bakol' (gotong royong) yang dilakukan selama ini membuat semua OPD bisa menggerakkan seluruh kegiatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga bisa terserap dengan baik.

KUBU RAYA, SP - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2021 menduduki peringkat kedua terbesar dari 375 kabupaten di Indonesia.

Serapan APBD Kubu Raya mencapai 95,79 persen dan selisih 0,11 persen dari Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang serapan APBD-nya terbesar pertama dengan 95,90 persen.

Usai menyerahkan penghargaan lomba Membacakan Kompetensi Sains Nasional 2021 dan mengukuhkan Duta Geospasial Cilik Kubu Raya tahun 2022 di ruang Praja Utama Aula Kantor Bupati, Kamis (6/1), Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, dirinya tidak menyangka Kubu Raya berada di peringkat kedua dalam serapan APBD di Indonesia.

Sebab, serapan APBD Kubu Raya yang dilakukan selama tahun 2021 itu bukan untuk mencari peringkat dan substansinya juga bukan ambisi untuk mendapatkan peringkat tercepat atau terbesar.

"Alhamdulillah kegiatan-kegiatan dan kinerjanya sangat baik semuanya. Termasuk dengan strategi 'kepong bakol' (gotong royong) yang dilakukan selama ini membuat semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menggerakkan seluruh kegiatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terserap baik. Alhamdulillah serapan anggaran di semua OPD rata-rata diatas 95 persen," kata Muda.

Dengan serapan anggaran di semua OPD rata-rata di atas 95 persen itu menghasilkan APBD Kubu Raya 95,79 persen pada 15 Desember 2021 dan jumlah itu menjadikan daya serap APBD Kubu Raya menduduki peringkat kedua terbesar di Indonesia.

"Capaian ini bukan hanya sekadar bangga dengan tingginya tadi, tapi yang diserap juga berdampak langsung ke masyarakat dan dampak nyerapnya juga banyak, namun jika yang dikerjakan banyak mubazir tantu akan percuma saja," katanya.

"Tapi yang kita kerjakan ini sangat jelas dampaknya, contohnya seperti *stunting* yang penurunannya sangat

jelas signifikan, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan yang sangat bermanfaat melalui lieterasi dan dengan cara memperkuat semua sekolah-sekolah dengan meningkatnya jumlah kelulusan di setiap sekolah," sambungnya.

Muda mengatakan bahwa capaian ini juga menjadi tantangan di semua OPD Kubu Raya. Tentu kedepannya semua OPD sudah mengetahui bagaimana mengefektifkan serapan anggarannya.

Terkait sisa anggaran Rp 28 miliar yang belum

terserap, Muda menegaskan anggaran itu munculnya belakangan, karena pada 30 Desember baru keluar Dana Bagi Hasil (DBH), baik dari provinsi maupun pusat, sehingga dana itu tidak bisa digunakan.

"Perlu diketahui, kita

tidak bisa menyerap Rp 28 miliar tersebut karena dana ini merupakan Dana Bagi Hasil dari pemerintah provinsi yang baru masuk saat mendekati batas akhir laporan yaitu tanggal 30 Desember, sehingga dana tersebut memang tidak bisa

kita gunakan di tahun 2021," jelasnya.

"Namun, dana ini akan kita gunakan untuk tahun 2022. Jika keluarnya awal Desember, maka anggarannya itu bisa kita gunakan untuk Belanja Tak Terduga (BTT)," jelas Muda. (Iwu)